

Belang Kejaksanaan Mulai Tampak

Audit Riam Merasap Belum Final

PONTIANAK. Alasan Kejaksanaan Tinggi Kalbar menghentikan kasus Riam Merasap Ketapang karena bersandar pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan tak bermasalah. Fakta baru terungkap, audit lembaga itu ternyata belum final.

"Auditnya belum selesai," tegas Bambang Wahyudi B, Kepala BPKP Perwakilan Kalbar dijumpai Equator saat menghadiri pembukaan Rakernas VIII Apkasi Kalbar di Taman Fantasi Ganderia, Kubu Raya, Jumat (24/6).

Meski tidak menyebutkan kapan persis audit terhadap Riam Merasap mulai dilak-

sanakan, namun Bambang mengindikasikan proyek itu belum bisa disimpulkan apakah ada pelanggaran atau tidak. "Masih dalam proses," ujarnya.

Apa yang disampaikan Bambang ini jelas menimbulkan pertanyaan besar. Sebab selama ini Kejati Kalbar selalu

■ Halaman 7



Bambang Wahyudi B. J. RATNO

Belang Kejaksanaan

menjelaskan sudah ada audit dari BPKP yang salah satu kesimpulan audit tersebut menyatakan belum menemukan indikasi kerugian negara.

Atas dasar audit BPKP yang diklaim Kejati Kalbar itu, menyebabkan proses hukum Riam Merasap dihentikan akhir 2010 dan hanya tahap Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket).

Soal penghentian proses hukum kasus ini memang sudah lama menyimpan tanda tanya. Bahkan sejumlah pihak meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Kalbar menjalankan kewenangannya melakukan audit terhadap kerugian keuangan negara.

"Kalau memang BPKP sudah melakukan audit fisik proyek, kita minta BPK melakukan audit kerugian keuangan negara agar

jelas persoalannya. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan soal mega proyek ini," tegas Thomas Aleksander SSos, anggota DPRD Kalbar Dapil Ketapang-KKU kepada Equator, belum lama ini.

Menurutnya, megaprojek yang menelan Rp 135 miliar itu sudah delapan tahun itu sudah delapan tahun itu terbengkalai. Kalau tidak ada masalah kenapa airnya tidak mengalir. Apakah konsultan teknis atau konsultan perencanaan yang salah, atau memang dari segi pelaksanaan proyeknya yang salah.

"Ketika saya turun ke lokasi, dari segi pengambilan sumber air saja sudah salah. Karena air yang diambil itu tekanannya tidak baik, di Km 12-Siduk. Sehingga, dilakukan drain pompa. Untuk mendorong setiap 10 km dilakukan pemompaan agar airnya

mengalir. Tapi itukan tidak bias berjalan, pendorong air kan bukan hal gampang. Membutuhkan listrik 24 jam," ujar Thomas.

Thomas menyesalkan penghentian proses hukum kasus tersebut. Pihak Kejati seharusnya lebih teliti dalam menangani kasus tersebut. "Kita minta SP3 ditinjau ulang, untuk itu perlu ada audit dari BPK, kalau hasil audit BPK ada pelanggaran, ya ditindak tegas," kata legislator PDI Perjuangan ini.

Hingga berita ini diturunkan, Kejati Kalbar belum berhasil dimintai komentarnya. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati, Arifin Arsyad SH mengaku sedang rapat saat dihubungi Equator via selularnya kemarin. "Sedang rapat," kata Arifin. (tim)

.... dari halaman 1